KAMPUNG KB
UPAYA NYATA MEMBANGUN BANGSA

KAMPUNG KB

UPAYA NYATA MEMBANGUN BANGSA

DAFTAR ISI

YAYASAN
CCP
Cipta Cara Padu Foundation

BkkbN

FP
2020

AFP
ADVANCE
FAMILY PLANNING

Yayasan Cipta Cara Padu
JL. Berlian No.5 RT.09/RW.11 Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur - 13330
Telp: +62 21 2289 0140 - Fax: +62 21 2289 0226
email: secretariat@yccp-indonesia.org - Website: www.yccp-indonesia.org
Facebook: Cipta Cara Padu Foundation - Instagram/Twitter: @cipta_indonesia

TIM PENYUSUN

Upaya Nyata Membangun Bangsa

Pengarah:
Inne Silviane

Penyusun:
Cheerli, Ika Christi Susanti

Editor:
Dini Haryati, Cheerli

Kontributor:
Yeni Tri Herwanto, Tuty Sri Supiaty,
Endang Achmad Fauzie,
Edi Kurniawan,
Mamik Prasetyo, Saparudin,
M. Ikraman, Ester Monika, Yosafat MR,
Christiana T. Desintawati, Iffah Udiana

Cover & Layout:
Ihsanul Hakim

Diterbitkan oleh
Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP)

Nomor ISBN:

KATA PENGANTAR

Salam hangat,

Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) merupakan organisasi *non-profit* yang didirikan pada tahun 2008 dengan pengalaman luas dalam advokasi di bidang kesehatan dan lingkungan. Sejak berdiri, YCCP telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan sejumlah program unggulan, termasuk dalam mendukung penguatan program Keluarga Berencana.

Pada tahun 2016-2017, YCCP dipercaya untuk melakukan penguatan Kampung KB di beberapa daerah. Seperti kita ketahui bersama Kampung KB merupakan program nasional yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016 dengan tujuan untuk membangun Indonesia dari desa.

Melalui program *Advance Family Planning* (AFP) dan FP2020-*Rapid Respons Mechanism* (RRM), YCCP membantu memfasilitasi penyusunan rencana kerja Kampung KB, sehingga desa-desa Kampung KB bisa memiliki rencana kerja strategis, efisien, dan sesuai kebutuhan. Selain itu, YCCP juga membantu melakukan advokasi kepada para pengambil keputusan agar mendukung pelaksanaan Kampung KB.

Sebagai mitra pemerintah yang diberi mandat untuk melakukan penguatan program Kampung KB, hingga September 2017, YCCP telah melakukan penguatan pada 346 Kampung KB di 25 kabupaten/kota 6 provinsi.

Bukan hanya akan mengulas berbagai upaya menarik yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mendukung Kampung KB, namun buku ini juga akan bercerita tentang pengalaman terbaik yang telah dilakukan beberapa daerah dan desa dalam menyukseskan program Kampung KB.

Harapannya, buku ini bisa memberikan inspirasi positif bagi semua pembaca, baik itu dari kalangan pegiat/praktisi isu-isu pembangunan sosial, pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, para mitra, dan juga masyarakat.

Bagi seluruh pegiat lapangan, narasumber, dan kontributor yang telah membantu dalam penyusunan buku, kami ucapkan banyak terimakasih. Semoga semua informasi yang disampaikan bisa menjadi motivasi untuk kembali memajukan program KKBPK dan juga program-program pembangunan lainnya di Indonesia

Selamat Membaca

Inne Silviane
Direktur Eksekutif YCCP

Salam hangat,

Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) memiliki visi untuk bekerja dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan masyarakat yang lebih melek kesehatan dan pejuang kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Penulisan buku ini merupakan bagian dari dokumentasi pembelajaran terbaik dari upaya yang dilakukan YCCP untuk menguatkan kembali program KKBPK di Indonesia, termasuk dalam mendukung program nasional Kampung KB yang dicanangkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.

Melalui program *Advance Family Planning* (AFP) dan program Penguatan Kampung KB- FP2020-*Rapid Respons Mechanism* (RRM) YCCP melakukan berbagai dukungan kepada daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Kampung KB di wilayahnya.

Dengan program AFP, para pemangku kepentingan di daerah diberikan fasilitasi untuk melakukan penyusunan rencana kerja Kampung KB, termasuk melakukan advokasi kepada pihak pengambil keputusan agar mendukung program tersebut. Dengan pembentukan *District Working Group* (DWG) yang beranggotakan para pemangku kepentingan dan para pejuang KB, AFP bekerja dengan melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi.

Sementara itu, melalui program Penguatan Kampung KB-FP2020 RRM dilakukan intergrasi Kampung KB dengan Tim KB Desa , kemudian dilakukan advokasi anggaran APB Desa untuk Kampung KB, melakukan replikasi 1 Kampung KB di setiap kecamatan, serta meningkatkan kerja sama lintas sektor.

Terbitnya buku pembelajaran advokasi lapangan Kampung KB ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi kabupaten/ kota di seluruh Indonesia untuk mengembangkan program KKBPK, termasuk dalam menjalankan program Kampung KB di daerahnya masing-masing. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Selamat Berkarya
Ketua Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP)

Sugiri Syarief, MPA

Salam hangat,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga buku hasil pembelajaran advokasi lapangan di daerah Kampung KB yang dijalankan oleh Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) melalui program *Advance Family Planning* (AFP) dan Penguatan Kampung KB FP2020-*Rapid Respons Mechanism* (RRM) telah selesai disusun.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan gambaran kepada semua pihak baik itu kalangan pemerintah dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga kelurahan dan desa, para pelaksana, pembina, dan mitra kerja tentang pentingnya melakukan penguatan kembali program KKBPK di Indonesia, termasuk dengan menjalankan program Kampung KB.

Pada tahun 2000, program KKBPK pernah menunjukkan keberhasilan dengan mampu menurunkan angka kelahiran total menjadi 2,6 dari 5,6 pada tahun 1970. Sayangnya keberhasilan itu tidak berlanjut, lebih dari satu dekade angka kelahiran total tetap diposisi yang sama. Berubahnya sistem pemerintahan menjadi otonomi/desentralisasi disinyalir menjadi penyebab utama stagnannya capaian KB dalam 10 tahun terakhir ini. Walaupun berdasarkan hasil SDKI 2017 turun menjadi 2,4 tetapi angka ini masih jauh untuk mengejar menjadi 2,1 sesuai dengan target kita.

Terutama jika pemimpin daerah baik gubernur, maupun bupati/walikota tidak memahami hakikat dari program KKBPK di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai upaya strategis maupun inovasi untuk menguatkan kembali program KKBPK.

Berbagai upaya, inovasi, maupun strategi yang diceritakan dalam buku ini diharapkan bisa diterapkan oleh seluruh daerah di Indonesia, sehingga upaya percepatan revitalisasi program KKBPK bisa segera tercapai dengan baik dan optimal.

Kampung KB merupakan kegiatan strategis yang perlu dilakukan mengingat program tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunan (nawacita) pemerintah periode 2015-2019 pada agenda prioritas nomor tiga yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" dan nawacita nomor lima yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".

Melalui Kampung KB diharapkan komitmen para pemangku kepentingan, terutama untuk keterpaduan program semakin meningkat sehingga program pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu YCCP dalam melaksanakan advokasi penguatan program KKBPK, termasuk dalam pelaksanaan program Kampung KB.

Akhir kata semoga buku ini bermanfaat dan dipergunakan sebaik-baiknya, serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta program-program pembangunan lainnya.

Plt Kepala BKKBN,

dr. Sigit Priohutomo, MPH

A

AFP : *Advance Family Planning*
ADPIN : Advokasi Pengerakan dan Informasi
ADD : Alokasi Dana Desa
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APB Desa: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

B

BPS : Badan Pusat Statistik
BPD : Badan Permusyawaratan Desa
BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BOKB : Bantuan Operasional Keluarga Berencana
BUMDes : Badan Usaha Masyarakat Desa
BKB : Bina Keluarga Balita
BKR : Bina Keluarga Remaja
BKL : Bina Keluarga Lansia

C

CSR : *Company Social Responsibility*

D

DPPKB : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
DPPKBPP : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
DP2KBP3A : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP3AP2KB : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
DWG : *District Working Group*
DFAT : *Department of Foreign Affairs and Trade*

I

ICMM : *Improving Contraceptive Method Mix*
IBI : Ikatan Bidan Indonesia
IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPB : Institut Pertanian Bogor

K

Kominfotik: Komunikasi, Informasi dan Statistika
Kemenko PMK : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KB : Keluarga Berencana
KKBPK : Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

L

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

M

MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP : Medis Operatif Pria/Vasektomi

O

OPD : Organisasi Perangkat Daerah

P

PLKB : Petugas Lapangan Keluarga Berencana
PUS : Pasangan Usia Subur
POKJA : Kelompok Kerja
PWG : *Provincial Working Group*
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
PKK : Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PUPR : Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
P2WKSS : Peningkatan Peran Wanita menuju Keluaga Sehat Sejahtera
P4 : Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

R

RRM : *Rapid Respons Mechanism*
RT : Rukun Tetangga

S

SK : Surat Keputusan
SE : Surat Edaran
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SDM : Sumber Daya Manusia
SDKI : Survei Demografi Kesehatan Indonesia

T

TFR : *Total Fertility Rate*/Total Angka Kelahiran
TKBD : Tim Keluarga Berencana Desa

U

UPT : Unit Pelaksana Teknis
UPTD : Unit Pelaksanan Teknis Daerah
UTS : Universitas Teknologi Sumbawa
USAID : *United States Agency for International Development*
UKM : Usaha Kecil Menengah

Y

YCCP : Yayasan Cipta Cara Padu

MENGEM
SEMA
PROGRA

BALIKAN
NGAT
M KKBPK

Lebih Baik Dengan KB

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang mencapai 1,38 persen atau sebanyak 3 juta jiwa pertahun, membuat pemerintah perlu menguatkan kembali program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang telah lama mengalami stagnansi.

Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan, angka total kelahiran (Total Fertility Rate/TFR) Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 2,4. Padahal, Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) 2010-2014 telah dirumuskan visi baru "Penduduk Tumbuh Seimbang 2015" dengan target menurunkan angka TFR menjadi 2,1.

Berdasarkan hasil SDKI 2017 tersebut, bisa dikatakan target menurunkan TFR belum tercapai. Maka dari itu, tidak heran bila pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan.

Situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dengan laju pertumbuhan saat ini yang mencapai 1,38 persen, maka pada tahun 2020 mendatang jumlah penduduk Indonesia akan meningkat hingga 271 juta jiwa. Jumlah ini memperlihatkan adanya kenaikan sebanyak 16 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya di tahun 2015 yang mencapai 255 ribu jiwa. Parahnya, jumlah ini akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya.

Kondisi ini tentu harus segera dicarikan solusi, karena laju pertumbuhan yang tidak terkendali bisa membawa dampak buruk bagi perkembangan suatu negara. Baik itu dalam aspek ekononi maupun kesehatan. Apalagi, sampai saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

Sonny Harry Harmadi, Staf Ahli Bidang Kependudukan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, paska kemerdekaan (1950) angka perkawinan dan kelahiran mengalami kenaikan, sehingga tahun tersebut dikenal sebagai "*The First Baby Boom*".

"*Baby Boom*" merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya ledakan jumlah kelahiran.

Bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi atau kondisi kesehatan masyarakat saja, jumlah penduduk yang tidak terkendali juga akan membuat Indonesia terancam tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Cita-cita menyejahterakan rakyat Indonesia pun menjadi impian semata.

Menurut Sonny, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah menjalankan program KKBPK. Program KKBPK sangat berkaitan dengan bonus demografi, karena program ini mengandung unsur ekonomi yang ujungnya pada kesejahteraan masyarakat.

Program KKBPK memiliki peran strategis yang dapat mempercepat kemajuan suatu bangsa. KB bukan hanya mengatur kelahiran, namun mendorong keluarga memiliki perencanaan lebih baik, sehingga nantinya sebuah keluarga dapat hidup sejahtera dan berkualitas.

"Harus disadari bahwa program KKBPK bukan sekadar program pengendalian jumlah anak saja, tetapi lebih dari itu, sebagai program pembangunan keluarga," kata Sonny.

Salah satu penyebab mengendurnya program KKBPK di Indonesia disinyalir kuat karena adanya perubahan sistem pemerintah terpusat menjadi otonomi/desentralisasi yang mulai diberlakukan pada tahun 1999.

Sejak dimulainya era itu, daerah diberikan kewenangan untuk membangun wilayahnya sendiri. Celakanya, banyak pemimpin daerah yang fokus pada pembangunan fisik semata, tanpa menghiraukan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembanguan keluarga bukan menjadi prioritas pembangunan daerah.

Akibatnya, sejak saat itu performa program KKBPK di Indonesia melemah. Bahkan, lebih dari 10 tahun capaian KB tetap diposisi yang sama.

Banyaknya kerugian yang bisa dialami Indonesia karena mengendurnya program KKBPK, secara jelas sudah memberi petunjuk bahwa menguatkan kembali program KKBPK adalah solusi efektif yang dapat dilakukan.

Berangkat dari itu, pemerintah berupaya untuk mempercepat upaya penguatan kembali program KKBPK, salah satunya dengan meluncurkan program percepatan seperti Program Kampung KB yang baru saja dicanangkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pada 14 Januari 2016.

Dibawah tanggung jawab BKKBN, harapannya bukan sekadar mampu menggaungkan kembali semangat penguatan program KKBPK, melainkan bisa menjadi inovasi dalam memecahkan segala tantangan kependudukan yang terjadi di negeri ini.

Kampung KB Sebagai Solusi

Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program bidang kependudukan yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah (Nawacita) butir 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Nawacita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, dan Nawacita kedelapan ialah melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

Dalam petunjuk teknis Kampung KB yang dituliskan BKKBN, arti dari Kampung KB ialah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan antara program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.

Sementara, pada kamus istilah kependudukan dan KB, Kampung KB adalah suatu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KKBPK, sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas.

Dengan semua definisi yang ada, Kampung KB dapat diartikan sebagai tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Pada Juknis Kampung KB juga dituliskan bahwa lingkup kegiatan Kampung KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pada pelaksanaan Kampung KB lintas sektor dilibatkan secara aktif.

Di sisi lain, Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa Kampung KB diluncurkan untuk menghidupkan kembali semangat program KKBPK. Terlebih pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, membuat berbagai kebutuhan perlu disiapkan. Seperti kebutuhan pokok serta lowongan pekerjaan agar masyarakat bisa sejahtera.

dapat diraih, dan kesejahteraan keluarga bisa terwujud.

Seperti yang telah disebutkan dalam definisi Kampung KB di atas, lokasi dalam program ini harus memiliki kriteria khusus yaitu desa dengan jumlah masyarakat miskin paling banyak, serta yang jumlah akseptor KB paling sedikit. Maka dari itu, lokasi Kampung KB di seluruh kabupaten/kota ialah desa terpencil, tertinggal, dan terbelakang.

Perbedaan lain ialah, Kampung KB merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Pada Juknis Kampung KB dituliskan bahwa lingkup kegiatan Kampung KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka dari itu, pada pelaksanaan Kampung KB lintas sektor dilibatkan secara aktif.

Untuk lebih memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, hal penting lain yang diperlukan ialah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang beranggotakan perwakilan dari perangkat desa, petugas kesehatan desa seperti bidan, serta perwakilan komunitas seperti kader, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Keberadaan Pokja ini penting karena merekalah yang akan menjadi motivator dan motor penggerak di lapangan.

"Oleh karena itu, KB digalakkan kembali karena sekarang persaingan antar negara semakin ketat. Semua ingin mensejahterakan rakyatnya, tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga ingin rakyatnya sejahtera, semua bersaing " kata Jokowi di lokasi peluncuran Kampung KB Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat (duaanak.com, 15/01/17)

Diyakini Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat, jika keluarga-keluarga di Indonesia bisa hidup sejahtera. Dengan kesuksesan program KKBKPK termasuk Kampung KB, harapannya pertumbuhan penduduk bisa teratasi, manfaat bonus demografi

5 Faktor Utama Keberhasilan Kampung KB:

1. Komitmen kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan
2. Integrasi Lintas Sektor
3. Optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja
4. Semangat dan dedikasi pengelola Kampung KB, termasuk petugas lini lapangan KB
5. Partisipasi aktif Masyarakat

Sumber: Petunjuk Teknis Kampung KB, BKKBN 2015

TID

BI

SEND

AK

SA

IRI

Kolaborasi adalah kunci keberhasilan, ungkapan ini bisa digunakan untuk menggambarkan pentingnya keterlibatan semua pihak, terutama lintas sektor dalam implementasi Kampung KB. Apalagi, pada indikator keberhasilan Kampung KB, bukan hanya peningkatan capaian KB saja yang akan dilihat, melainkan juga capaian bidang lainnya seperti kesehatan, sosial ekonomi, serta pendidikan, yang tentunya perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Maka dari itu, dalam menjalankan program Kampung KB, semua pihak perlu dilibatkan. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan swasta. Semua punya peran penting yang saling berkaitan satu sama lain. Dari mulai membuat peraturan pendukung, membantu memfasilitasi, hingga mendampingi masyarakat dalam menjalankan program di lapangan.

Sebagai kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk Kampung KB, ada beberapa hal yang sudah dilakukan BKKBN pusat untuk memperlancar pelaksanaan program tersebut. Di antaranya ialah melakukan advokasi kepada para *stakeholder* terkait.

Tujuannya bukan hanya sekadar membuat mereka mengetahui program saja, tetapi agar *stakeholder* memberikan dukungan komitmen guna memperlancar pelaksanaan Kampung KB di lapangan.

"Saat ini kami rasakan dukungan komitmen dari *stakeholders* makin membaik. *Awareness* dan *care* dari beberapa lembaga juga sudah semakin jelas terlihat," kata Wahidin, Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN.

Selain itu, BKKBN kini juga tengah berupaya melakukan sinergi Kampung KB dengan program dari kementerian lainnya. "Ada 19 kementerian yang mempunyai progam yang fokusnya di desa, sama seperti Kampung KB. Dari 19 kementerian inilah yang sekarang sedang dikelola untuk bisa bersinergi," ujarnya.

Menyoal pendanaan, Wahidin menyebutkan bahwa ada dukungan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dari pusat kepada kabupaten/kota yang bisa dimanfaatkan untuk pengelolaan Kampung KB. "Nilainya sekitar Rp 80-100 juta per desa Kampung KB," tambahnya.

Dalam Petunjuk Teknis BOKB dijelaskan bahwa dana tersebut ditujukan untuk membantu pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dalam membiayai kegiatan khusus, sebagaimana ditetapkan pada UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang mengamanatkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab pada pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS). BOKB bersifat membantu pemerintah kabupaten/kota, bukan sebagai pengganti dana APBD yang selama ini telah membiayai penyelenggaraan progam KKBPK di daerah.

Penggunaan dana BOKB juga cukup luas, bisa untuk pembiayaan operasional penyuluhan KB, distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten

ke fasilitas kesehatan/klinik KB, biaya operasional pengolahan data, pertemuan staf, alat tulis kantor, langganan daya dan jasa, biaya transport dan biaya jasa pengiriman. BOKB ditunjukkan dalam rangka penguatan penggerakan untuk menjamin ketersediaan kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan KB di daerah.

"Inilah salah satu upaya kita untuk melakukan percepatan, di samping itu kami juga mengajak kepada siapa saja yang memiliki perhatian kepada masyarakat di kampung/desa, termasuk YCCP yang merupakan salah satu lembaga yang peduli," ucap Wahidin.

Menurutnya, di dalam BKKBN sendiri, kini setiap direktorat telah diarahkan untuk mendukung Kampung KB. Artinya setiap kegiatan harus merujuk ke Kampung KB. Contohnya untuk pelatihan, teman-teman di provinsi disiapkan untuk melatih kepala desa dan penyuluh KB supaya terjadi persamaan persepsi.

Sementara itu, untuk mendapatkan dukungan komitmen dari legislatif, BKKBN pada 2017 lalu juga telah mengundang legislatif untuk mengikuti kegiatan kunjungan lapangan Kampung KB. Harapannya mereka bisa melihat dan berdiskusi langsung dengan masyarakat Kampung KB. Pada kesempatan itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD), dan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat untuk kemajuan bersama. "Adanya kunjungan anggota legislatif itu bisa memancing masyarakat, termasuk jika ada UPTD yang tidak melakukan apa-apa. Disitu semua akan terlihat," ujarnya.

Upaya lainnya, BKKBN akan mengoptimalkan peran penyuluh dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk mendampingi Kampung KB. Apalagi, saat ini PLKB sudah menjadi bagian dari BKKBN pusat.

Selanjutnya BKKBN pun akan mengupayakan adanya sosialisasi berbarengan antara kepala desa dan PLKB untuk menyamakan persepsi, termasuk di dalam kegiatan tersebut akan disampaikan berbagai materi pendukung misalnya mengenai kebijakan dan petunjuk penggunaan dana.

Di sisi lain, Muhammad Ikhsan, Asisten Sekretaris Daerah, Kabupaten Sumbawa menyatakan, melalui kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan kelompok kerja advokasi KB atau yang dikenal dengan *District Working Group* (DWG) yang didampingi YCCP melalui program Penguatan Kampung KB-FP2020 RRM, maka seluruh desa Kampung KB di Kabupaten Sumbawa kini telah memiliki rencana kerja termasuk rencana kegiatan potensial yang bisa dilakukan untuk mengembangkan Kampung KB. Sehingga mereka tidak merasa bingung untuk menjalankan program di lapangan.

Menurutnya, sejak adanya arahan Presiden terkait Kampung KB, Kabupaten Sumbawa telah melakukan perubahan Surat Keputusan anggota DWG, dengan lebih banyak melibatkan lintas sektor terkait.

"Tujuannya bukan hanya mendapat dukungan dari lintas sektor, tapi semua sama-sama berperan untuk memajukan Kampung KB di Kabupaten Sumbawa,"jelas Ikhan yang juga menjabat sebagai Ketua DWG, Kabupaten Sumbawa.

9

Sementara, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Kusmana menjelaskan, ada banyak hal yang telah dilakukan pihaknya guna menyukseskan program Kampung KB. Mulai dari advokasi kepala daerah, instansi diluar BKKBN, organisasi masyarakat, kepada tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat, serta melakukan sosialisasi Kampung KB kepada pihak terkait.

Menurutnya, dalam menjalankan advokasi dan sosialisasi, pihaknya banyak dibantu oleh *Provincial Working Group* (PWG) dan DWG yang telah diinisiasi oleh YCCP. Hasilnya semua pihak kini telah mendukung Kampung KB. Semua kecamatan se-Kalimantan Barat juga telah memiliki satu Kampung KB. Bahkan, melalui PWG pihak swasta berkomitmen memberikan dana *Company Social Responsibility* (CSR) mereka untuk mendukung penguatan program KKBPK, termasuk Kampung KB.

Sebagai seorang Camat, Iwan Sofian punya cara tersendiri dalam mengajak masyarakatnya di Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa agar terlibat aktif menjalankan Kampung KB. Bagi Iwan, masyarakat adalah subjek bukan sebagai objek. Artinya mereka harus selalu dilibatkan dalam proses, karena merekalah yang akan menjalankan semua itu. Iwan dan perwakilan dari Kecamatan Lantung juga ikut terlibat dalam penyusunan rencana kerja Kampung KB yang difasilitasi oleh DWG Sumbawa pada akhir 2016.

Diceritakan upaya awal yang dirinya lakukan ialah sosialisasi manfaat program KKBPK kepada kepala desa, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), kepala sekolah, dan juga komunitas masyarakat. “Sambil sosialisasi, saya juga mulai mempelajari budaya dan adat istiadat masyarakat disini,” kata Iwan yang mulai menjabat sebagai Camat Lantung pada Oktober 2016.

Iwan melanjutkan, agar masyarakat tertarik dia mengemas isu KB bukan pada pembatasan jumlah anak, melainkan kepada isu kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dia mencontohkan awalnya tidak ada yang mau melakukan Medis Operatif Pria (MOP/Vasektomi). Setelah dilakukan sosialisasi masif terus menerus, mulailah ada beberapa orang yang tertarik.

Pada saat itu, hal utama yang diyakinkan ialah MOP tidak akan mengurangi vitalitas. “Bersyukurnya mereka percaya dan mau mencoba, hingga Januari 2018 akseptor MOP di Kecamatan Lantung sudah sebanyak 53 orang, dari tidak ada sama sekali di November 2016” jelas Iwan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim KB Kecamatan Lantung.

Untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam ber-KB, kami juga melakukan kerjasama dengan Dinas KB untuk melakukan pelayanan KB, setidakya setiap bulan sekali ada pelayanan terpadu di kecamatan atau desa, termasuk untuk pemasangan alat kontrasepsi. Untuk meyakinkan warga, kuncinya adalah dengan memberikan informasi lengkap, tepat, dan jelas, dan informasi yang disampaikan juga harus terus menerus. Tetapi, jangan jadikan masyarakat sebagai penerima informasi saja, libatkan mereka sebagai teman diskusi.

Saat ini Lantung menjadi salah satu desa Kampung KB terbaik di Kabupaten Sumbawa. Sejak masuknya Kampung KB, desa gersang ini telah berubah menjadi desa agrowisata yang hijau dan menarik. Empat desa di Kecamatan Lantung semuanya merupakan desa Kampung KB. Kesuksesan Lantung menjalankan Kampung KB menjadikan daerah ini dijadikan percontohan Kampung KB lainnya.

AG
BERJ
DAN BE

AR
ALAN
RHASIL

Mengimplementasikan program Kampung KB bukanlah hal mudah. Harus ada cara-cara khusus yang dilakukan, apalagi banyak aspek dalam program ini yang menjadi perhatian, Mulai dari KB, pendidikan, kesehatan, ekonomi yang tujuan akhirnya meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebagai mitra pemerintah, Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) melalui program *Advance Family Planning* (AFP) dan Penguatan Kampung KB-FP2020 *Rapid Respons Mechanism* (RRM) mendapatkan mandat untuk melakukan penguatan Kampung KB di beberapa daerah.

Melalui AFP, para pemangku kepentingan di daerah diberikan fasilitasi untuk melakukan penyusunan rencana kerja Kampung KB, termasuk melakukan advokasi kepada pihak pengambil keputusan agar mendukung program tersebut. Dengan pembentukan *District Working Group* (DWG) yang beranggotakan para pemangku kepentingan dan para pejuang KB, AFP bekerja dengan melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi. Tujuannya tidak lain untuk menguatkan kembali program KKBPK di era desentralisasi.

Program yang dimulai pada tahun 2010 ini diawali pada dua kabupaten/kota, Bandung dan Pontianak. Kemudian, dua tahun selanjutnya pada 2012, menyusul tiga kabupaten/kota lain yakni Karanganyar, Bogor, dan Karawang. Saat ini AFP mendampingi Kapuas Hulu, Bengkayang, Kuningan, Kota Ambon dan Kota Tual.

Sementara itu, Program Penguatan Kampung KB-FP2020 RRM yang memiliki tujuan mengintegrasikan Kampung KB dengan Tim KB Desa, meningkatkan anggaran APB Desa Kampung KB, mereplikasi 1 Kampung KB di setiap kecamatan, serta meningkatkan kerja sama lintas sektor. Daerah program ini meliputi 6 kabupaten/kota yang dulunya merupakan daerah program *Improving Contraceptive Method Mix* (ICMM) yakni Sumbawa, Lombok Barat, Lombok Timur, Tuban, Lumajang, dan Kediri.

Adapun upaya yang dilakukan AFP dan FP2020 RRM dalam Kampung KB ialah peningkatan kapasitas PWG dan DWG dalam advokasi peningkatan peran kepala daerah dan lintas sektor dalam mendukung Kampung KB dan membantu fasilitasi penyusunan rencana kerja Kampung KB. Pelatihan menggunakan perangkat SMART melibatkan kepala desa, bidan, kader dan PLKB dan desa-desa Kampung KB. Hasilnya, setiap desa Kampung KB memiliki rencana kerja yang efisien, strategis, dan sesuai kondisi serta kebutuhan daerah.

Untuk menyukseskan pelaksanaan Kampung KB, AFP dan FP2020 RRM memiliki beberapa strategi. Strategi ini bisa diadopsi oleh mitra nasional, pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap program kependudukan dan KB.

Mengidentifikasi Lokasi yang Tepat

Dalam kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki beberapa syarat seperti jumlah keluarga miskin terbanyak dan capaian program KKBPK yang rendah. Sementara, pada kriteria wilayah setiap Kampung KB harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), dan terpencil dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB), Kabupaten Kapuas Hulu, Martha Banang mengatakan salah satu keberhasilan Kapuas Hulu menjalankan Kampung KB karena pemilihan lokasi yang tepat.

Menurutnya, ada beberapa proses penting yang dilakukan DSP3AP2KB dalam proses penentuan desa. Pertama yaitu melakukan identifikasi desa sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian, melakukan pertemuan dengan DPRD untuk penetapan desa.

Baru setelah itu berdiskusi dengan para pemegang kebijakan tertinggi seperti sekretaris daerah, wakil bupati, dan bupati untuk mendapat rekomendasi langkah apa saja yang perlu dilakukan. "Proses diskusi pun tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dalam beberapa tahap. Semua itu agar mendapat hasil maksimal," kata Martha.

Setelah kriteria sesuai dengan arahan semua pihak, akhirnya diputuskanlah bahwa Desa Riam Tapang yang merupakan desa paling terpencil dan terpelosok menjadi daerah pertama penerima program Kampung KB di Kapuas Hulu.

Sesuai prediksi, hasilnya pun cukup menakjubkan, hanya dalam waktu delapan bulan Kampung KB berhasil merubah Riam Tapang menjadi daerah baru yang nyaman bagi penduduknya. Bahkan, berkat dukungan semua pihak, Kampung KB Riam Tapang kini sering dijadikan percontohan Kampung KB nasional.

Menguatkan Koordinasi Lintas Sektor

Mendorong keterlibatan, inisiatif, dan kepemilikan lokal penting dilakukan untuk mendukung program Kampung KB, mengingat banyak aspek yang harus diperhatikan dalam program ini, di tengah masih adanya tantangan ego sektoral yang kadang terjadi.

Untuk itu, perlu strategi yang tepat, salah satunya dengan membentuk kelompok kerja lintas sektor baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Tujuannya agar terjalin kerjasama dan koordinasi antar para pemangku kepentingan. Adapun penjelasan mengenai

masing-masing kelompok kerja di berbagai tingkat wilayah adalah sebagai berikut:

Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan KB Provinsi/ *Provincial Working Group* (PWG)

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, akademisi, lembaga donor, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab PWG adalah melakukan advokasi kebijakan di tingkat provinsi dan pembinaan, serta pemantauan kegiatan advokasi Kampung KB di tingkat kabupaten /kota.

Kelompok Kerja Advokasi Kependudukan dan KB Kabupaten-Kota /*District Working Group* (DWG)

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi, akademisi, lembaga donor, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab DWG adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja dalam upaya advokasi Kampung KB di tingkat kabupaten/ kota.

Selain itu DWG juga bertugas untuk mengadvokasi camat, kepala puskesmas dan pemegang kebijakan lainnya di tingkat kecamatan agar bersedia mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Tim KB Desa/Kelurahan, termasuk untuk meningkatkan pelayanan MKJP oleh bidan atau dokter di tingkat desa/kelurahan

Tim KB Kecamatan

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan yang berasal dari perwakilan pemerintah, organisasi keagamaan, dan sektor swasta yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah. Tugas dan tanggung jawab Tim KB Kecamatan adalah melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan program kerja advokasi Kampung KB di tingkat desa.

Tim KB Desa-Kelurahan/Tim Kampung KB

Beranggotakan para pemangku kepentingan di tingkat desa yang berasal dari perwakilan pemerintah, tokoh agama/tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat dan individu yang dibentuk berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan spesifik daerah.

Tugas dan tanggung jawab Tim KB Desa/Kelurahan adalah menyusun perencanaan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program kerja dalam upaya peningkatan capaian Kampung KB di tingkat desa.

Setelah pokja-pokja terbentuk, langkah lain yang bisa dilakukan ialah:

- Sinkronisasi perencanaan program, kegiatan, hingga anggaran Kampung KB di setiap sektor terkait.

- Advokasi kepada pemeritah daerah untuk mendanai operasional pokja di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan untuk Tim KB Kecamatan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tim KB Desa (TKBD) mengunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

- Melakukan advokasi kepada kepala desa untuk menganggarkan kegiatan Kampung KB melalui APB Desa.

Meningkatkan Komitmen Kepala Daerah

Meningkatkan komitmen pemerintah daerah (pemegang kebijakan) juga sangat penting untuk dilakukan. Era desentralisasi yang berjalan saat ini, disinyalir membawa dampak kurang baik pada pelaksanaan program KKBPK, apalagi jika pemimpin daerah baik itu gubernur, bupati/walikota, camat atau kepala desa kurang memahami program dan manfaatnya. Maka dari itu, YCCP bersama kelompok kerja selalu melakukan audiensi kepada para kepala daerah saat program masuk.

Adapun beberapa hal yang harus disiapkan di antaranya ialah data kondisi kependudukan dan KB di daerah tersebut. Kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga sebagai manfaat dari program yang dikaitkan dengan berbagai isu potensial seperti Indeks Pembangunan Masyarakat, Bonus Demografi, Total Kelahiran dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengalamannya saat melakukan advokasi, Ketua PWG Kalimantan Barat, Aida Mochtar menceritakan, biasanya daerah yang tidak menjadikan program KKBPK sebagai prioritas ialah daerah yang pemimpinnya kurang memahami manfaat dari program.

"Karena tidak paham makanya mereka tidak menjalankan, namun setelah diberikan pemahaman kebanyakan bupati/walikota biasanya langsung antusias. Bahkan ada bupati yang menyesali kenapa saya tidak datang lebih awal, saat masih tahap perencanaan," ceritanya.

Untuk menyiasati dukungan yang datang tidak pada waktu yang tepat. Hal yang bisa dilakukan ialah melakukan perencanaan dan penganggaran untuk tahun berikutnya atau saat APBD-Perubahan. Upaya lainnya ialah dengan meminta dukungan kebijakan, dalam bentuk surat edaran atau peraturan pendukung lainya seperti Surat Keputusan atau Peraturan Bupati.

Sebagai program nasional yang membutuhkan peran lintas sektor, bupati bisa mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan

Kampung KB. Dalam surat tersebut, bupati juga bisa mengimbau agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjalankan programnya di desa-desa Kampung KB.

Meningkatkan Kapasitas Pegiat Kampung KB

Peningkatan kapasitas bagi seluruh pengelola dan pelaksana Kampung KB mulai dari tingkat provinsi sampai desa tidak kalah penting untuk menyukseskan program tersebut. PWG, DWG, atau TKBD, termasuk pengelola Kampung KB yang memegang peranan penting dalam hal ini harus mampu menjelaskan apa manfaat dari Kampung KB. Agar semua mau mendukung, kapasitas mereka terkait Kampung KB harus melebihi pihak lain yang akan diyakinkan.

Terkait hal itu, YCCP mengadopsi pendekatan AFP untuk mengembangkan perangkat SMART. Perangkat ini bisa membantu kelompok kerja di desa/kelurahan untuk menyusun strategi dan kegiatan Kampung KB berdasarkan kondisi daerahnya.

Peserta yang terlibat dalam diskusi penyusunan rencana kerja ini adalah lintas sektor. Peserta dari desa yang terlibat antara lain kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader KB/kesehatan, PLKB, bidan dan tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk atau Pokja Kampung KB di desa/kelurahan. Peserta dalam kelompok sebanyak 7-8 orang. Diskusi mengutamakan keterlibatan aktif setiap peserta. Keseleruhan proses idealnya dilakukan selama 3 hari (masing-masing 8 jam/hari).

Perangkat SMART terdiri dari 2 tahap dan 12 langkah. Tahap pertama yaitu pemetaan dan perumusan isu, sedangkan tahap kedua ialah penyusunan rencana kerja. Tahap pemetaan dan perumusan isu membawa peserta berdiskusi untuk lebih mengenali wilayah Kampung KB secara mendalam. Peserta mulai mengidentifikasi sasaran wilayah, menggambarkan peta desa wilayah Kampung KB, mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dimiliki, data kependudukan, hingga program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta permasalahan yang ada di desa tersebut. Ketersediaan dan kualitas data menjadi kunci utama pada tahap ini. Sehingga kegiatan ini sekaligus mendorong peserta memahami pentingnya data dan penggunaannya dalam menyusun rencana kegiatan.

Setelah melewati tahap pertama, peserta akan memasuki tahap dua yaitu penyusunan rencana kerja. Peserta mulai dengan menetapkan tujuan Kampung KB dengan kaidah SMART. Yaitu tujuan disusun secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Kemudian peserta menentukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mencapai tujuan tersebut. Hasil diskusi pada langkah-langkah sebelumnya menjadi landasan menyusun rencana kerja, menetapkan indikator keberhasilan pada setiap kegiatan, menyusun rangkaian kegiatan, dan terakhir membuat rencana tindak lanjut.

SMART yang dikembangkan sejak pertengahan 2016 ini telah diujicobakan pada lebih dari 200 desa di Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam aplikasinya, perangkat SMART juga mampu membantu fasilitator memandu diskusi untuk peningkatan peran dan kerjasama lintas sektor di lokasi Kampung KB guna menyukseskan pembangunan Kampung KB. Selain itu, seiring dengan proses fasilitasi akan dihasilkan rincian kebutuhan yang perlu diberikan lintas sektor kabupaten/kota.

ALAT PERENCANAAN KAMPUNG KB - SMART

TAHAP - 1

Pemetaan dan Perumusan Isu

ALAT PERENCANAAN KAMPUNG KB - SMART

TAHAP - 2

Penyusunan Rencana Kerja

SEMANG
MEMBA
NEG

AT DESA
ANGUN
ERI

Gg Vasektomi

Nama Kampung KB langsung melejit ketika awal 2016 lalu Presiden RI ke-7 Joko Widodo mencanangkan program ini dihadapan ratusan warga dan tamu undangan yang hadir pada acara pencanangan program di Kabupaten Cirebon.

Sejak itu, dibawah tanggung jawab BKKBN Presiden mengimbau agar seluruh kabupaten/kota di Indonesia membentuk satu Kampung KB dan mulai saat itu juga setiap kabupaten/kota semangat menjalankan program ini.

Sebagai mitra pemerintah yang diberi mandat untuk melakukan penguatan program Kampung KB, hingga September 2017, YCCP telah melakukan penguatan pada 346 Kampung KB di 25 kabupaten/kota 6 provinsi.

Dalam perjalanannya ada banyak pengalaman dari sejumlah kabupaten/kota tersebut. Ada juga kisah menarik dari para pegiat KB di lapangan.

Di samping itu, peran kelompok kerja advokasi KB, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa di sejumlah daerah juga sangat mendukung dan terbukti ampuh meningkatkan koordinasi antara para pemegang kebijakan dan masyarakat.

Salah satu contohnya yaitu kabupaten Tuban yang terpilih sebagai kabupaten dengan pengelolaan Kampung KB terbaik se-Jawa Timur pada tahun 2016. Penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur itu sebagai apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam implementasi Kampung KB.

Kinerja DWG Tuban untuk memperkuat Kampung KB menghasilkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat diintegrasikan di lokasi Kampung KB.

Pada akhir 2016, Tuban juga telah memiliki Kampung KB di semua kecamatan. Tidak sekadar diresmikan saja, kelompok kerja Kampung KB yang telah terbentuk juga dilatih agar mampu menyusun dan menjalankan rencana kerja Kampung KB.

Selain itu, untuk lebih memajukan Kampung KB DWG Tuban juga fokus melakukan advokasi kepada lintas sektor terkait.

Kabupaten Kediri

Manfaatkan Potensi Desa

Meski sudah banyak diketahui masyarakat luas, namun hingga kini masih banyak yang beranggapan bahwa program KKBPK adalah program kontrasepsi. Program KKBPK dimengerti hanya sebagai program pembatasan jumlah anak, jadi tidak heran bila yang tertarik mengikuti program KKBPK hanya pasangan yang ingin tidak punya anak lagi dan biasanya jumlah anak mereka sudah lebih dari 2-3 orang. Untuk itu, perlu cara menarik untuk mengajak masyarakat agar mau turut serta dan mengetahui arti program KKBPK sesungguhnya.

Program KKBPK bukan sekadar program kontrasepsi semata, melainkan program keluarga yang sangat banyak manfaat. Mulai dari menjaga kesehatan keluarga, mencegah kematian ibu dan anak, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ujungnya untuk mencapai cita-cita pembangunan.

Bagi Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, masuknya program Kampung KB merupakan sebuah peluang untuk bisa memperbaiki kondisi desa maupun masyarakat. Desa ini merupakan salah satu desa yang ditetapkan sebagai Kampung KB Kabupaten Kediri di awal tahun 2017.

Bukan hanya dipilih karena capaian KB yang rendah, Krenceng juga merupakan desa dengan beragam tantangan di bidang pembangunan keluarga, di antaranya Krenceng merupakan desa dengan angka pernikahan usia anak dan perceraiannya tertinggi se-Kecamatan Kepung.

Ary Budianto, Camat Kepung menyatakan dengan kondisi program KKBPK yang lemah, Krenceng juga merupakan desa kedua dengan penduduk terbanyak, sekitar 10 ribu jiwa yang tersebar di enam dusun. Kendati begitu, Krenceng juga dikenal sebagai desa dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama tanaman buah maupun sayur seperti durian, pisang, rambutan, dan jagung. Maka dari itu, banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) pembuat makanan ringan di Krenceng seperti pabrik olahan getuk pisang, dodol, dan lainnya. Krenceng dikenal juga sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Kediri karena memiliki sumber mata air yang konon memiliki khasiat sebagai air awet muda.

Sumari, Kepala Desa Krenceng mengatakan dengan berbagai potensi itu, dia optimis bahwa ke depannya kondisi Krenceng akan lebih baik, apalagi dengan masuknya program Kampung KB yang punya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menarik minat masyarakat, Sumari pun punya cara sendiri agar warganya mau mendukung program Kampung KB, termasuk mengikuti program KKBPK. Sejak masuknya program Kampung KB, Sumari sudah memiliki beberapa rencana sosialiasi dan advokasi kepada pihak-pihak terkait.

Dengan bantuan DWG Kediri, Sumari berencana melakukan advokasi kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk Dinas Pertanian dimaksud agar mendapatkan bantuan bibit tanaman gratis dan juga penyuluhan tentang bercocok tanam yang baik dan benar. "Dalam hal ini, warga terutama para peserta KB diutamakan sebagai penerima bantuan, sehingga warga lain akan tertarik menjalankan program KKBPK bersama," katanya.

Sementara kepada Dinas Pariwisata, Sumari ingin meminta dukungan untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di desa Krenceng. "Karena ke depannya, kami berencana mengembangkan Krenceng menjadi desa wisata air dan juga petik buah," tutur Sumari.

Konsep tersebut dilakukan agar warga tertarik mendukung pelaksanakan program Kampung KB, karena melalui program ini bukan hanya

desa yang diuntungkan masyarakat juga bisa mendapat manfaat. Apalagi hampir seluruh warga di Desa Krenceng bertani buah dan sayur

Dalam menjalankan Kampung KB, Sumari merasa bersyukur karena Krenceng mendapat banyak dukungan, terutama dari DWG. Di antaranya dalam menyusun rencana kerja Kampung KB. Melalui pelatihan SMART, desa menjadi lebih mudah menyusun tahapan kegiatan Kampung KB. Apalagi, desa juga diminta menyusun potensi dan tantangan yang ada. Hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan kegiatan prioritas yang bisa dilakukan untuk mencapai hasil maksimal.

Langkah lainnya, Sumari juga berencana melakukan sosialisasi manfaat KB di Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di desanya. Dengan mendatangi mereka di tempat kerja, dia merasa upaya promosi KB akan lebih diterima. Sebab warga tidak akan mudah bosan karena sambil mengerjakan pekerjaan mereka jadi bisa tetap produktif juga. Selain itu, dengan mendatangi UKM sasaran promosi juga lebih efektif, karena sebagian besar karyawan UKM ialah kelompok wanita usia produktif. Biasanya bila satu sudah tertarik yang lain juga akan ikut.

Ary, Camat Kepung menambahkan, agar lebih efektif mendapat dukungan warga, rencananya sosialisasi Kampung KB juga akan mendatangi komunitas, seperti kelompok tani dan kelompok pengrajin.

Di sisi lain, Dewi, salah satu anggota DWG dari DP2KBP3, Kabupaten Kediri menerangkan, memang ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung Kampung KB. Di antaranya DWG berhasil melakukan advokasi kepada pemeritah kabupaten untuk mengeluarkan peraturan mendukung. Hasilnya pada 2017 lalu diterbitkan Surat Edaran (SE) Bupati Kediri No.476/801/418.22/2017 tentang pembentukan Kampung KB yang didalamnya mengharuskan setiap kecamatan memiliki satu Kampung KB, termasuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kampung KB dan mengintegrasikan kegiatan Tim KB Desa/ Kelurahan (TKBD) dengan program Kampung KB.

Dengan itu, maka seluruh kecamatan di Kabupaten Kediri telah memiliki satu Kampung KB (total 26 Kampung KB), dimana 16 di antaranya telah memiliki Surat Keputusan (SK) dan hampir semua desa telah mengintergasikan kegiatan TKBD dengan Kampung KB.

Di samping berkerjasama dengan YCCP untuk melalukan fasilitasi rencana kerja kepada 26 desa, DWG juga membantu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan pelayanan KB dan kesehatan di desa Kampung KB, hingga mendukung sosialisasi manfaat KB kepada masyarakat. Harapannya melalui semua itu, pelaksanaan Kampung KB bisa berjalan lancar mendapat hasil maksimal, yang manfaatnya bisa dirasakan semua pihak.

Desa Ploserejo, Kecamatan Gampangrejo merupakan desa Kampung KB yang telah merasakan manfaatnya. Menurut Reni, PLKB Ploserejo, setelah ditetapkan sebagai desa Kampung KB pada Juni 2017 lalu. Kampungnya banyak mengalami kemajuan, bukan hanya sarana infrastruktur seperti jalan dan balai pertemuan warga yang diperbaiki, namun kini jumlah peserta KB, khususnya KB-MKJP mengalami peningkatan dari 34,86% pada Januari 2017 menjadi 36,25% di Juli 2017.

Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah sosialisasi KB yang dilakukan TKBD. “Setelah ditetapkan menjadi desa Kampung KB, kami langsung gencar melakukan sosialisasi KB kepada warga, kebetulan pada saat bersamaan juga ada kegiatan momentum memperingati hari lahir Kabupaten Kediri dan karena informasi terkait manfaat KB juga sudah tersebar, maka banyak warga yang tertarik untuk menjadi akseptor KB,” jelas Reni.

Untuk menarik minat warga terhadap program Kampung KB, Kepala Desa Ploserejo akan bekerja sama dengan DWG dan Dinas Pertanian dalam mengembangkan konsep Kampung KB Agrowisata, dimana warga yang menjadi akseptor KB nantinya akan mendapatkan bibit tanaman sayur gratis yang mereka bisa tanam di pekarangan rumah dan hasilnya bisa dimanfaatkan, baik untuk keperluan pribadi atau diperjual belikan guna menambah penghasilan keluarga.

Meski masih pada tahap awal dan masih mencari potensi setiap desa untuk dijadikan isu strategis, namun Kabupaten Kediri sangat optimis program Kampung KB dapat berjalan dengan baik. Apalagi, melalui DWG semua lintas sektor dilibatkan secara aktif untuk mendukung program tersebut. Ditambah lagi, setiap desa Kampung KB sudah memiliki rencana kerja yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kegiatan.

Kabupaten Lombok Barat

Rangkul Semuanya

Menjalankan program Kampung KB perlu melibatkan banyak pihak, pasalnya hal ini bukanlah tugas mudah yang bisa dikerjakan sendirian. Banyaknya yang terlibat ini di satu sisi merupakan nilai positif, di sisi lain bisa memunculkan sisi negatif jika potensi yang ada tidak dapat disatukan dan dikelola dengan baik. Perlu ada tim kuat dan kompak yang bisa menyatukan semua potensi untuk melepaskan ego sektoral yang masih sangat sering terjadi.

Keberadaan DWG sebagai tim kerja di berbagai daerah telah terbukti membuat upaya penguatan program KKBPK menjadi lebih mudah. Di Kabupaten Lombok Barat misalnya, berkat kolaborasi yang baik antara anggota DWG dengan berbagai pihak terkait berhasil membuat program Kampung KB di kabupaten ini berjalan baik dan membuahkan hasil positif.

DWG Lombok Barat sendiri beranggotakan perwakilan dari lintas sektor terkait, mulai dari perwakilan instansi pemerintahan seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPA) dan dinas lainnya, serta perwakilan dari organisasi keagamaan dan organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Bahkan, bukan hanya capaian program KKBPK saja yang mengalami peningkatan, namun dukungan pemerintah daerah terhadap program KKBPK pun menjadi lebih baik, dibuktikan dengan keluarnya beberapa peraturan pendukung.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016 tentang pembentukan Kampung KB dan mengikuti arahan Presiden RI, maka BKKBN mencanangkan 10 Kampung KB di Kabupaten Lombok Barat. Artinya, setiap kecamatan sudah memiliki 1 Kampung KB sehingga sudah sesuai dengan target BKKBN pusat.

Pada pencanangan itu dihadiri Deputi Advokasi Pengerakan dan Informasi (ADPIN) 2016, Abidinsyah Siregar.

Pencanangan Kampung KB diharapkan menjadi motivasi baru bagi semua pihak untuk memperkuat program KKBPK di Lombok Barat. Pada kesempatan ini pula, DWG sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten yang bertugas melakukan advokasi program KKBPK mulai melakukan berbagai upaya guna menyukseskan program tersebut.

Di antaranya dengan menjalin sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak terkait. Bahkan, untuk lebih menguatkan tim yang sudah ada, DWG melakukan revisi Surat Keputusan (SK) keanggotaan DWG dengan lebih banyak melibatkan lintas sektor lain yang berpotensi mendukung pelaksanaan Kampung KB di lapangan.

Upaya lain yang dilakukan ialah menjalin komunikasi informal antar anggota, misalnya saja dengan langsung menghubungi orang terkait, sehingga komunikasi antar anggota juga berjalan lebih baik. Cara informal ini bukan berarti tidak menghiraukan struktur birokrasi yang ada, karena tata cara birokrasi seperti surat menyurat tetap dilaksanakan.

DWG Kabupaten Lombok Barat sendiri telah dibentuk sejak tahun 2013, ketika Lombok Barat menjadi mitra YCCP pada program ICMM. Kendati ICMM telah berakhir pada 2016, dengan kolaborasi yang kuat dan kompak antar semua anggota dan juga komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten, maka DWG Lombok Barat pun tetap berdiri.

Melalui program Penguatan Kampung KB FP2020-RRM, DWG semakin gencar melakukan advokasi dan menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, terutama guna menyukseskan Kampung KB.

Upaya yang dilakukan pun kembali membuahkan hasil positif, salah satunya pada awal 2017, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 50 juta pertahun untuk mendukung kegiatan DWG dalam penguatan Kampung KB.

Selain itu, pada tahun yang sama kegiatan TKBD juga tidak hanya fokus pada meningkatan MKJP saja, melainkan sudah terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan Kampung KB.

Erni Suryana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lombok Barat mengatakan, pada 2018 DWG dan DPPKB akan fokus terhadap penguatan Kampung KB di 10 Kampung KB Lombok Barat, karena pada tahun ini semua Kampung KB sudah memiliki dana operasional dari Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

"Penambahan jumlah Kampung KB tidak ada, karena tahun ini kami fokus terhadap penguatan Kampung KB. Salah satunya seperti kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi," jelasnya.

Pada tahun ini, kami juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh lintas sektor. "Caranya dengan mengadakan pertemuan rutin lintas sektor dan DWG untuk saling bertukar informasi terkait bentuk dukungan yang bisa diberikan kepada Kampung KB," pungkas Erni saat dihubungi via telepon.

Kabupaten Lombok Timur

Libatkan Tokoh yang Didengar

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dikenal sebagai daerah dengan masyarakatnya yang religius. Dengan penduduk muslim sekitar 99%, warga di sana pun sangat mendengarkan ajakan dari tokoh agama. Warga di sana juga kerap mengikuti nasihat dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang ada.

Dari situlah, DWG Lombok Timur melibatkan tokoh agama, tokoh adat, maupun tokoh masyarakat dalam melakukan advokasi program KKBPK, termasuk penguatan Kampung KB. Untuk sosialisasi kepada masyarakat, para tokoh tersebut juga dilibatkan. Tujuannya agar upaya yang dilakukan lebih efektif.

Untuk menggugah pemegang kebijakan ataupun masyarakat dalam menyukseskan program Kampung maka para tokoh tersebut kerap menyampaikan manfaat-manfaat program KKBPK di setiap kesempatan. Baik saat mereka membawakan ceramah saat pengajian dan khutbah Jumat, mereka juga menyampaikan program KKBPK dalam diskusi-diskusi ringan. Para tokoh agama juga memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para santri mereka dan juga saat memberikan pengarahan pada calon pengantin.

Bukan hanya siap membagi nasihat, para tokoh ini pun siap menjadi tempat tanya jawab terkait program KKBPK. Pesan-pesan yang disampaikan disesuaikan dengan ajaran Al-quran.

- *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu"* (QS-Al Baqarah, Ayat 185)
- *"Allah ingin meringankan bebanmu, karena manusia diciptakan lemah"* (QS-An Nisa, Ayat 28)

Dengan ayat ini maka para tokoh sepakat tidak melarang KB, asalkan penundaan kehamilan dan membatasi jarak kelahiran dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu dan anaknya. Ini didukung karena Allah tidak membenarkan manusia untuk meninggalkan keturunan yang lemah. Lemah dalam hal kesehatan, ataupun lemah dalam hal ekonomi. KB pun didukung karena terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sejak tahun 1980-an program KKBPK sendiri sebenarnya telah tersosialisasikan dengan baik di Lombok Timur, namun seiring meredupnya program KKBPK secara nasional, maka kondisi KB di Lombok Timur pun mengalami hal yang sama.

Di 2012, masuknya program ICMM dengan dukungan *United States Agency for International Development* (USAID) dan *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) menjadi awal digaungkannya kembali program KKBPK di daerah tersebut. Dengan inisiasi YCCP pula, DWG akhirnya dibentuk untuk memudahkan koordinasi antar para pemangku kepentingan. Melihat besarnya peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat maka DWG melakukan advokasi kepada para tokoh tersebut melalui pertemuan advokasi dengan mengundang para tokoh ternama di Lombok Timur. Bukan hanya sekadar memberi informasi tentang program KKBPK, pertemuan tersebut juga sebagai ajang diskusi dan berbagi pandangan.

Disampaikan, program KKBPK bukan untuk memutus keturunan, melainkan mengatur jarak kehamilan. Bukan juga sebagai program yang fokus pada pengunaan alat kontrasepsi, tetapi program yang bertujuan menyejahterakan keluarga. Hasilnya pun cukup baik, sejak itu para tokoh di Lombok Timur mendukung program KKBPK.

Untuk menjalankan program Penguatan Kampung KB FP2020-RRM di 2016, DWG kembali melibatkan para tokoh tersebut untuk bersama-sama menyukseskan program KKBPK di Lombok Timur. Sesuai dengan target BKKBN, maka setiap kecamatan di Lombok Timur sudah memiliki 1 Kampung KB.

Pada 2018, Lombok Timur akan fokus pada penguatan di seluruh Kampung KB. Selain itu, berencana untuk melakukan pencanangan Kampung KB baru, karena beberapa kecamatan berniat mengembangkan lebih dari satu Kampung KB di wilayahnya. Hingga saat ini, total Kampung KB di Lombok Timur berjumlah 20 desa.

Kabupaten Sumbawa

Ubah Jadi Menarik

Kabupaten Sumbawa merupakan wilayah terluas di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk mencapai 441.102 jiwa. Laju pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,23%, dimana angka itu di atas rata-rata nasional. Bagi pemerintah kabupaten, kondisi tersebut sangatlah mengkhawatirkan, apalagi bila dibandingkan dengan minimnya potensi sumber daya alam yang ada. Dalam mengatasi hal tersebut, ada berbagai upaya yang telah dilakukan Sumbawa, salah satu nya dengan membentuk DWG untuk melakukan advokasi menjalankan program nasional Kampung KB.

Keberhasilan Kabupaten Sumbawa dalam menjalankan program KKBPK memang sudah tidak perlu diragukan, keberadaan DWG banyak membawa capaian positif bagi perkembangan KB di kabupaten tersebut, dimana kini ada banyak regulasi pendukung yang dikeluarkan pemerintah kabupaten untuk menyukseskan program yang sempat meredup ini.

Untuk program Kampung KB sendiri, semua kecamatan di Kabupaten Sumbawa sudah memiliki Kampung KB, bahkan ada satu kecamatan, yaitu Lantung yang keempat desanya sudah dicanangkan menjadi Kampung KB. Pencanangannya pun dilakukan langsung oleh Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty.

Membuat semua pihak mendukung dan mau bersama-sama membangun program KKBPK bukanlah hal mudah. Muhammad Ikhsan, Asisten Sekretaris Daerah selaku Ketua DWG Kabupaten Sumbawa mengatakan, ada banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari melakukan advokasi dengan bupati, mengadakan pertemuan lintas sektor, hingga advokasi program-program KKBPK, termasuk Kampung KB kepada kecamatan dan desa.

"Langkah awal yang dilakukan ialah mencari dukungan dan komitmen semua pihak untuk mau mendukung Kampung KB. Maka dari itu, sejak ditetapkan menjadi program nasional oleh Presiden RI kami DWG langsung bergerak melakukan advokasi ke semua pihak terkait. Bahkan, tiap bulan kami melakukan pertemuan rutin untuk membahas strategi advokasi dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mendukung Kampung KB," kata Ikhsan saat ditemui di ruang kantornya,

Menurutnya, hingga 2017 sudah ada 27 Kampung KB di Kabupaten Sumbawa dari 24 kecamatan, dimana satu kecamatan yaitu Lantung memiliki 4 Kampung KB. Pemilihan seluruh Kampung KB juga dilakukan melalui proses yang serius, karena bagi pemerintah kabupaten Sumbawa program ini sangat potensial yang bisa dimanfaatkan pula sebagai program pengentasan kemiskinan.

"Pemilihannya dilihat dari desa-desa dengan capaian KB dan kesehatan terendah berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang dilakukan DWG," jelasnya.

Di samping semua upaya tadi, ada hal menarik yang dilakukan beberapa Kampung KB di Kabupaten Sumbawa untuk menyukseskan program tersebut yaitu desa-desa Kampung KB mengubah wajah desa menjadi lebih menarik, bukan hanya tampilan desa yang diubah menjadi lebih bagus dan bersih. Namun, isu-isu KB juga dikemas dengan ringan, sehingga mudah dipahami warga. Hasilnya, bukan hanya didukung seluruh warga untuk menjalankan Program Kampung KB, desa-desa tersebut juga mendapat bantuan dari semua pihak, termasuk lintas sektor untuk mengembangkan desa mereka.

Kampung KB Desa Lantung, Kecamatan Lantung menjadi salah satu contoh menarik, bahkan desa ini menjadi inspirasi Kampung KB lainnya. Lantung dulu dan kini telah berubah 180 derajat. Desa yang dikenal sangat jauh di pelosok, dengan akses jalan belum beraspal, ditambah sulit air, kini telah berubah menjadi salah satu desa wisata ternama di Kabupaten Sumbawa. Bukan itu saja, inovasi yang dilakukan Lantung mampu menarik minat seluruh

masyarakatnya untuk sama-sama memajukan desa, melalui program Kampung KB. Dari hanya 16,98% jumlah peserta KB-MKJP di tahun 2016, meningkat menjadi 73,58% di 2017 dan setelah menjadi Kampung KB.

Inovasi yang dilakukan ialah Lantung mengubah desanya menjadi desa agrowisata, dengan pemanfaatkan pekarangan, pagar sebagai tempat menanam sayur-mayur, serta bunga dengan konsep hidroponik dan akuaponik yang menggunakan pupuk organik. Ini merupakan terobosan berani karena desa ini dikenal sangat sulit air, bahkan area pesawahan di sana mengunakan konsep sawah tadah hujan, yang penanaman dilakukan hanya pada musim hujan.

Semangat warga ini ternyata ditularkan dari Camat Lantung, Iwan Sofian, dialah motor penggerak perubahan Lantung. Menurut Iwan, bagi dia program Kampung KB adalah anugerah yang harus dimanfaatkan dengan baik. "Karena melalui Kampung KB desa sangat berpotensi untuk mendapat dukungan banyak pihak," ujarnya. Iwan menyadari membuat orang lain memberikan dukungan tidak cukup dengan melakukan upaya-upaya sederhana, namun harus benar-benar punya konsep menarik, sehingga akhirnya dilirik.

Konsep desa agrowisata tersebut dia kembangkan, karena yakin bahwa banyak potensi yang bisa dilakukan masyarakatnya, hanya saja mereka butuh dipicu, diberi semangat, dan dicontohkan.

Iwan mengaku mengubah Lantung seperti sekarang bukan hal mudah, dia perlu menyakinkan kepala desa dan para tokoh masyarakat di sana untuk mau menjalankan program bersama.

Agar warga tertarik, Iwan mengemas program Kampung KB bukan menjadi program KKBPK semata, melainkan program pemberdayaan yang bisa memajukan desa dan juga mensejahterakan masyarakat. "Saya memberi semangat kepada warga, saya bilang bila Kampung KB kita berhasil jangankan dukungan untuk mendapatkan air bersih yang bisa didapat. Insya allah dukungan lain pun bisa kita raih untuk memajukan kampung ini,"ujarnya.

Awalnya tidak 100% warga yang melakukan penanaman pohon di pekarangan, hanya dilakukan oleh beberapa warga saja. Namun, setelah mereka melihat sayuran yang dihasilkan sangat bermanfaat, bisa memperindah rumah dan juga dikonsumsi pribadi, maka warga lain akhirnya tertarik melakukan hal itu.

Belum lagi, setiap akhir pekan, hari minggu pagi, Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes) selalu mengumpulkan hasil sayuran dan bibit tanaman, untuk dipasarkan ke Sumbawa Besar. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Langkah tersebut pun mendapat sambutan baik dari warga lain di luar Lantung, karena sayur mayur yang dihasilkan terbebas dari pestisida.

Iwan mengatakan, dia sangat bangga dengan warga Lantung. Semua keberhasilan ini didapat berkat dukungan besar dari seluruh masyarakat. Mereka pun secara swadaya menggunakan uang

pribadi untuk memperindah pekarangan dengan pohon-pohonan.

Seiiring makin dikenal, Lantung kini sudah banyak mendapat dukungan dari pihak lain, misalnya dukungan pelatihan pengemasan hasil sayur mayur dari mahasiswa Institute Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Pada 2017, Lantung pun mendapat bantuan sebanyak 262 alat penyiram tanaman dari Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga membantu membangun jalan desa, sehingga yang tadinya berbatu, berubah menjadi mulus beraspal.

Komitmen tinggi lintas sektor untuk mendukung Kampung KB di Kabupaten Sumbawa memang tidak perlu diragukan. Sebagai Kampung KB pertama di kabupaten, Dusun Batu Nisung telah merasakan manfaat dari kolaborasi itu. Banyak dukungan yang didapat, membuat Batu Nisung merubah menjadi desa bersih, sehat, dan masyarakat yang sejahtera.

Rahmi, salah satu warga mengaku, program Kampung KB telah banyak merubah desanya. Dusun Batu Nisung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas yang dulunya kumuh dengan banyak kotoran hewan ternak bertebaran di jalan-jalan desa kini sudah tidak ada lagi. Banyaknya warga yang mulai memanfaatkan pekarangan mereka, didukung dengan pemberian bibit tanaman holtikultura (sayur mayur) dari Dinas Pangan, maka kepala desa mengeluarkan peraturan agar hewan ternak tidak boleh lagi berkeliaran di jalan desa. Tujuannya, agar hewan-hewan ternak tidak merusak tanaman warga.

Pada 2017, sebanyak 20 orang warga juga mendapat kesempatan mengikuti pelatihan pertukangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Setiap bulannya, Dinas Sosial juga memberikan bantuan bahan makanan pokok kepada 10 orang lanjut usia di desa. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Dinas Kominfotik) memberikan dukungan akses internet gratis bagi warga desa. Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan bibit ikan kepada kelompok pembudidaya, sementara Dinas PU mendukung pembuatan pipa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal agar warga bisa hidup lebih bersih dan sehat dengan tidak lagi membuang air limbah rumah tangga langsung ke saluran air yang berpotensi mencemari sumber-sumber air.

KEMERDEKAAN
AKSES TANPA BATAS
KOMINFO
BP3TI
SUMBAWA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SDN BATU NISUNG
JL. WISATA NO. 61 LAB. BADAS

Hizbullah, Camat Labuan Badas menyatakan, semua dukungan yang didapat ini berkat kerjasama semua lini, baik dari aparat desa dan juga masyarakat. Sebagai camat, dirinya juga tidak bosan untuk selalu berdiskusi dengan warga tentang perkembangan Kampung KB maupun tentang persoalan lainnya yang ada di wilayahnya. "Setidaknya setiap satu minggu sekali, saya suka berkeliling desa. Untuk menambah semangat warga, kami juga membentuk komunitas produktif, seperti komunitas sadar lingkungan." jelas Hizbullah dikantor Desa Karang Dima.

Agar warga tertarik menjalankan program Kampung KB bersama-sama, maka mereka pun dilibatkan dari tahap perencanaan program, sehingga diketahui bentuk dukungan yang tepat, sesuai kebutuhan di lapangan. Warga pun tidak hanya dijadikan objek program semata, mereka juga menjadi penggerak program di lapangan

Di sisi lain, Elvy Wahyuni, Kepala Bidang KB, DP2KBP3A, menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan DWG akan terus berkomitmen menyukseskan program Kampung KB meski dukungan program FP2020 RRM telah berakhir. Menurutnya, melalui dukungan pelatihan penyusunan kerja dari YCCP, semua Kampung KB di Kabupaten Sumbawa kini sudah memiliki daftar kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Kampung KB. Langkah selanjutnya ialah DWG akan melalukan pembaruan keanggotaan, agar semua lintas sektor terkait bisa masuk dalam DWG, sehingga bisa mendukung Kampung KB secara maksimal.

"Kami juga sudah melakukan advokasi kepada bupati, untuk mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh lintas sektor untuk memprioritas dukungannya kepada Kampung KB," terang Elvy di sela-sela kegiatan pelayanan KB-MKJP di Kecamatan Lantung dengan peserta 12 akseptor Medis Operatif Pria (MOP/Vasektomi).

Pada 2018, DP2KBP3A Sumbawa akan fokus untuk penguatan Kampung KB, termasuk akan melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring evaluasi.

Kabupaten Lumajang

Berikan Informasi Lengkap

Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kampung KB pertama kali dicanangkan pada 18 April 2016 di Desa Selok Gondang, Kecamatan Sukodono. Kepala Dinas PPKBPP Kabupaten Lumajang, Farida Alfawati mengatakan bahwa program Kampung KB di Lumajang berjalan dengan baik. Dimana, kerjasama antara DPPKBPP bersama DWG membuahkan hasil positif. Keberhasilan advokasi yang dilakukan telah berhasil mendorong bupati untuk mengeluarkan peraturan pendukung program KKBPK, termasuk untuk Kampung KB.

Bupati menginstruksikan untuk melakukan replikasi/perluasan Kampung KB di seluruh kecamatan. Hasilnya, pada Februari 2017, seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang sudah memiliki satu Kampung KB dengan total jumlah sebanyak 21 desa.

Selain itu, kegiatan TKBD juga sudah terintegrasi dengan Kampung KB dan lintas sektor juga sudah menunjukkan dukungannya. "Semua keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari semua pihak. Baik itu pemerintah kabupaten, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (DPPKBPP), DWG serta seluruh lintas sektor yang mendukung," katanya.

Menurutnya karena Kampung KB ini tergolong sebagai program baru, maka sebagai penanggung jawab program, DPPKBPP wajib memberikan informasi yang jelas dan rinci kepada pihak-pihak terkait. Tujuannya agar semua mengerti, paham, sehingga nantinya mau mendukung.

Cara ini pun cukup ampuh, semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lintas sektor akhirnya mendukung pelaksanaan Kampung KB. Meskipun dukungan yang diberikan belum maksimal, namun semua lintas sektor telah mengalokasikan anggaran badan/dinas untuk mendukung pelaksanaan Kampung KB. Contoh dukungan yang ada misalnya dari Dinas Kesehatan yaitu dengan mengalokasikan dana untuk kelas *unmeet need* sebesar Rp. 2 juta untuk setiap puskesmas. Kelas *unmeet need* yang dimaksud ialah kelas penyuluhan program KKBPK yang diberikan kepada pasangan usia subur yang tidak ber-KB. Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memberikan informasi jelas, lengkap, dan benar mengenai program KKBPK. Selain itu, ada juga dukungan lain dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yaitu kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk TKBD sebesar Rp. 5 juta untuk setiap desa selama satu tahun.

Jonatan Kobba, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, DPPKBPP Kabupaten Lumajang mengatakan, dukungan dari DPMD kepada TKBD diberikan karena mereka sebagai pelaksanan kegiatan Kampung KB. Dengan dukungan tersebut, diharapkan Kampung KB bisa berjalan baik dan mendapatkan hasil optimal. "Tugas pokok TKBD adalah melakukan advokasi kepada warga tentang program-program KKBPK. Agar dapat dilaksanakan secara optimal mereka perlu mendapatkan dukungan," katanya.

Dia menambahkan, untuk menggaet lebih banyak dukungan, DWG dan DPPKBPP juga makin gencar melakukan advokasi baik formal maupun informal dengan seluruh pihak terkait, termasuk kepada LSM dan komunitas yang ada di Kabupaten Lumajang.

Melalui program Penguatan Kampung KB FP2020-RRM, seluruh desa Kampung KB di Kabupaten Lumajang juga sudah memiliki rencana kerja yang bisa membantu memudahkan TKBD dalam menjalankan program di lapangan. Dengan rencana kerja itu juga, TKBD bisa menyusun berbagai kegiatan potensial yang dapat mendukung Kampung KB. Penyusunan rencana kerja tersebut difasilitasi oleh fasilitator terlatih dari DWG Lumajang.

Kabupaten Kuningan

Satukan Kekuatan

Kuningan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat yang menjalankan Program *Advance Family Planning* (AFP). Sejak tahun 2015, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kuningan telah menjalin kerjasama dengan YCCP sebagai upaya penguatan kembali program KKBPK di daerah tersebut, termasuk mendukung pelaksanaan Kampung KB.

Udiarsa, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat, DPPKB menceritakan bahwa sebelum dicanangkan secara resmi, Kabupaten Kuningan sudah membentuk Kampung KB terlebih dahulu pada tahun 2015 dengan sasaran yang sama yaitu, memilih desa dengan capaian KB terendah.

Perbedaan ada pada indikator keberhasilan, dimana Kampung KB terdahulu hanya mengukur peningkatan KB saja, sedangkan Kampung KB baru melibatkan semua sektor dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua desa Kampung KB terdahulu, pada April 2016, Kabupaten Kuningan mencanangkan kembali enam desa Kampung KB baru yang dicanangkan langsung oleh Bupati Kabupaten Kuningan. Seiring perkembangan target Kampung KB, pada 2017 kabupaten kembali mencanangkan 27 Kampung KB baru.

Dengan demikian, jumlah total Kampung KB sampai akhir 2017 ialah 35 desa. "Rencananya pada 2018, DPPKB akan mencanangkan 10 Kampung KB baru," terang pria yang akrab disapa Uud ini.

Menurut Uud pemilihan Kampung KB di Kabupaten Kuningan sesuai dengan Juknis resmi dari BKKBN. Dengan kondisi demikian, maka tidak terbantahkan bahwa desa-desa tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk memajukan daerahnya.

Berbicara soal dukungan, ada sejumlah upaya advokasi yang telah berhasil dilakukan DWG bersama DPPKB. Di antaranya dengan terbitnya beberapa peraturan pendukung guna penguatan Kampung KB di lapangan.

Melalui Surat Edaran (SE) Bupati No. 476/1850.5/2016 pemerintah desa diimbau untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung program KKBPK. Selain itu, mereka juga diminta untuk membentuk Tim KB Desa sebagai penggerak KB di lapangan.

Dengan itu, maka seluruh desa kini sudah menganggarkan dana desa untuk mendukung program KKBPK, termasuk Kampung KB. Besaran dana alokasinya cukup beragam dari mulai jutaan hingga ratusan juta, seperti Desa Bendungan yang menganggarkan Rp. 120 juta/tahun untuk Kampung KB.

Selanjutnya, melalui SE No. 476/SE.03/2017 tentang dukungan SKPD terhadap Kampung KB, berhasil membuat sejumlah SKPD memberikan dukungan terhadap Kampung KB. Salah satu caranya, dengan menjadikan Kampung KB sebagai daerah program mereka. "Kedua payung hukum inilah yang membuat Kampung KB di Kabupaten Kuningan bisa berjalan baik. Pasalnya, desa maupun SKPD tidak lagi merasa ragu untuk mendukung program tersebut," kata Uud.

Denny Rianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengatakan, bahwa dinasnya sangat berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Kampung KB. "Pada 2018, rencananya 1-2 lokasi program adalah desa Kampung KB," terangnya.

Menurutnya, ada tiga program besar dinas yaitu Gemar Makan Ikan, U-Mina dan Bu-Mina, serta program *Biofolk* yang bisa disinergikan dengan Kampung KB. Untuk Gemar Makan Ikan sasarannya ialah ibu dan anak sebanyak 1000 jiwa pertahun.

Pada program ini, dinas akan memberikan olahan makanan dari ikan secara cuma-cuma kepada warga.

Sementara untuk U-mina dan Bu-mina, serta *Biofolk* dinas akan memberikan dukungan pembuatan kolam budidaya, serta pemberian bibit tanaman sayur dan buah kepada warga. Sasaran kedua program ini sebanyak 10-25 kepala keluarga di setiap desa.

Adapun proses pendampingan biasanya dilakukan pada satu siklus, mulai dari tahap pembuatan kolam, pemeliharaan, hingga proses panen. Pada saat pendampingan warga akan diberikan informasi lengkap mengenai cara budidaya ikan dan tanaman yang baik dan benar, sehingga pada siklus selanjutnya warga bisa secara mandiri mengelola itu semua.

"Semua program ini memiliki tujuan yang sama dengan Kampung KB yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu kami tidak ragu melakukan sinergi,"katanya.

Sementara itu, Ninin Nurmalasari, staf Dinas Koperasi mengatakan, pada 2017 setidaknya ada 3-4 UKM dari desa-desa Kampung KB yang telah diberikan dukungan pengadaan alat usaha senilai Rp. 25-50 Juta/UKM oleh Dinas Koperasi. Di antaranya ialah pengadaan mesin jahit kepada UKM Al-Umaro di desa Citenjo, Cibingbin, pengadaan alat pembuat bakso kepada UKM di Cisantana, Cigugur dan pengadaan alat koperasi seperti mesin penghitung uang dan kalkulator kepada UKM Perempuan di Tanjung Kerta, Karang Pancang.

Menurutnya, dukungan tersebut diberikan karena tujuan program Dinas Koperasi sejalan dengan Kampung KB yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dukungan lain juga datang dari Dinas Bina Marga dengan membantu pembangunan jalan-jalan desa.

Usep Yusep, Kepala Bidang Advokasi dan Penggerakan, DPPKB Kuningan, menambahkan bahwa dukungan Kampung KB tidak hanya datang dari SKPD saja, melainkan juga dari Bupati. Terlihat dari seringnya Bupati mensosialisasikan Kampung KB pada setiap kesempatan. "Tingginya komitmen juga terlihat dari adanya penambahan alokasi anggaran APBD untuk Dinas KB, " ujarnya.

Pada tahun 2017, anggaran Kampung KB di DPPKB ialah sebesar Rp. 200 juta per tahun yang digunakan untuk pembentukan, pembinaan dan pelatihan pengelola Kampung KB. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp. 150 juta pada tahun 2016.

Menurut Usep, berkat adanya dukungan dari DWG dan YCCP, seluruh Kampung KB saat ini juga sudah memiliki rencana kerja yang dapat memudahkan dalam mengembangkan potensi dan menghadapi tantangan. "Dengan semua ini, kami berharap ke depannya 376 desa/kelurahan di Kuningan semuanya bisa menjadi Kampung KB," terang Usep. Di sisi lain Ardi Wijaya, Kepala Desa Bendungan, mengaku bahwa pihaknya sangat bersemangat dalam menjalankan program Kampung KB. Terlebih saat dirinya bersama dua orang perwakilan desa diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan mengenai Kampung KB dari DWG.

"Kami meyakini bahwa ini adalah program bagus karena menyasar semua aspek. Mulai dari agama, sosial budaya, ekonomi, hingga pendidikan. Bagi kami Kampung KB adalah potret Indonesia seharusnya. Kami yakin keberhasilan Kampung KB dapat menghasilkan masyarakat yang berkualitas, sejahtera, dan maju sesuai dengan harapan kita semua," paparnya.

Untuk mendukung program Kampung KB, Desa Bendungan mengalokasikan dana desa sebesar Rp 126 juta pada tahun 2017 lalu.Dana tersebut digunakan untuk pembangunan Balai Kampung sebesar Rp 85 juta dan juga kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan Tri Bina, Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Remaja (BKR). Salah satu materi yang diberikan ialah pemahaman mengenai program KKBPK, termasuk pengertian dari Kampung KB.

Pada kesempatan itu, diinformasikan juga bahwa program KKBPK tidak hanya sebatas kontrasepsi dan pembatasan jumlah anak saja, melainkan program kesejahteraan keluarga dengan banyak manfaat. Upaya lain yang dilakukan, PLKB dan Kader juga saling bekerja sama untuk melakukan sosialisasi KB kepada para pasangan usia subur.

Hasilnya sesuai dengan harapan capaian KB-MKJP Desa Bendungan mengalami peningkatan dari 27% pada tahun 2016, meningkat menjadi 36,27% hingga November 2017.

Sementara itu, Rakib, Kades Dukuh Lor menyampaikan, masuknya program Kampung KB ke desanya telah memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga kondisi desa. Dengan dukungan SKPD warga Dukuh Lor diberikan berbagai pelatihan pemberdayaan, seperti pengolahan makanan ringan, permen jahe dan keripik tempe dari DPPKB melalui program Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Kemudian pelatihan menjahit dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lainnya adalah pelatihan tata rias wajah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dengan banyaknya dukungan itu, bukan hanya desa tapi warga juga merasakan banyak manfaat dengan adanya program Kampung KB. "Maka dari itu, tidak begitu sulit bagi kami untuk mengajak warga medukung program ini,"akunya.

Usep menyampaikan, semua kelancaran perjalanan program Kampung KB di Kabupaten Kuningan tidak lepas dari besarnya dukungan semua pihak yang ada. Mulai dari Bupati, SKPD, desa, hingga masyarakat. Kekuatan itu kemudian dijadikan satu dan diperkuat dengan keberadaan kelompok kerja advokasi KB di tingkat kabupaten (DWG), maupun desa (Tim KB Desa). Bukan hanya memperkuat kolaborasi semua pihak, keberdaan DWG dan Tim KB Desa terbukti memudahkan upaya penguatan program KKBPK.

Kabupaten Bengkayang

Maksimalkan Peran Motivator KB

Jangan pernah meremehkan peran motivator KB di lapangan. Motivator yang dimaksud adalah para anggota Tim KB Desa (TKBD), para kader, anggota Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), termasuk para penyuluh KB (PLKB). Peran mereka dalam meyakinkan masyarakat agar mau mendukung dan menjalankan program sangatlah penting. Buktinya, kontribusi mereka berhasil memberikan dampak positif bagi kemajuan program KKBPK di Kabupaten Bengkayang, termasuk untuk pelaksanaan program Kampung KB.

Kabupaten Bengkayang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Memiliki luas wilayah 5.396,30 km^2 dan berpenduduk 242.788 jiwa (BPS 2017). Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 kecamatan, 122 desa dan 2 kelurahan.

Buruknya kondisi geografis, terbatasnya anggaran, dan tidak adanya tenaga penyuluh KB di kabupaten tersebut menjadi tantangan nyata yang harus dialami kabupaten ini. Tetapi lain dulu lain sekarang. Keberadaan DWG ditambah dukungan dari para motivator KB di lapangan ini menjadikan program KKBPK kembali bersinar di kabupaten tersebut. Capaian KB pun sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Salah satu keberhasilan terbaik DWG bersama Dinas KB kabupaten ialah berhasil melakukan advokasi peningkatan anggaran kepada eksekutif dan legislatif guna merekrut tenaga PLKB yang sebelumnya tidak dimiliki Bengkayang. Kini setiap kecamatan telah memiliki 1 PLKB, dengan total 17 PLKB. Bukan hanya direkrut, para PLKB ini juga diberikan pelatihan peningkatan kapasitas yang bisa membantu mereka menjalankan tugas di lapangan.

Bagi Kampung KB, peran PLKB sangat penting dan krusial. Pasalnya, bukan hanya menjalankan tugas rutin, seperti melakukan pendataan dan pelaporan terkait jumlah pasangan usia subur (PUS) dan capaian KB saja. Mereka juga melakukan sosialisasi tentang Kampung KB bersama TKBD dan para motivator lain. Upaya inilah yang membuat masyarakat mendukung pelaksanaan Kampung KB di desanya.

Antonius Tony, Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkayang menyatakan bahwa saat ini program Kampung KB masih dalam tahap persiapan dan pendataan, belum sampai pada tahap aksi atau kegiatan. Dukungan dari lintas sektor terkait yang ada pun belum maksimal. "Jika ada dukungan yang terlihat baru dari perangkat kecamatan tetapi untuk SKPD belum semuanya," ujarnya.

Maka dari itu, DWG Bengkayang dalam waktu dekat ini akan melakukan advokasi kepada Bupati untuk terus memberikan arahan kepada SKPD yang yang terkait, sehingga semua komponen bisa mengambil peran dalam program Kampung KB.

Di Kabupaten Bengkayang, Pokja Kampung KB merupakan bagian dari Tim KB Desa, yang juga mempunyai peranan penting. Dalam Juknis Kampung KB disebutkan, Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB yang dibentuk pada tingkatan wilayah desa dan beranggotakan perwakilan dari berbagai pihak terkait seperti perangkat desa, petugas kesehatan, kader, tokoh agama maupun tokoh masyarakat, serta perwakilan komunitas memegang peranan penting bagi keberhasilan program Kampung KB.

Agar kinerja TKBD ini dapat terukur, maka perlu adanya legalitas kepengurusan Pokja yang harus disahkan oleh kepala daerah setempat, yang dalam hal ini ialah Kepala Desa.

Meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi, saat ini Kampung KB yang telah terbentuk di Kabupaten Bengkayang berjumlah 17 desa dari 17 kecamatan. Salah satu desa Kampung KB juga

sudah mengalami kemajuan kondisi, baik yang berkaitan dengan KB maupun diluar itu. Sebut saja desa Lesabela di Kecamatan Ledo dan desa Tiga Berkat di Kecamatan Lumar.

Meskipun dengan pendanaan terbatas, kedua desa tersebut sudah mulai merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di antaranya seperti meningkatkan promosi akan manfaat KB MKJP, membentuk poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta meningkatkan sosialisasi tentang peningkatan usia kawin dan menyepakati hukum adat jika ada yang menikah dibawah umur.

Kedua desa ini juga sudah mulai meningkatkan jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kualitas guru PAUD. Penyuluhan tentang pertanian, pengadaan air bersih, *rabat beton* (jalan di perkampungan penduduk) dan *bokalpet* (jembatan penyeberangan sungai) juga sudah dilakukan.

Bahkan, pada tahun 2017 lalu, desa Tiga Berkat mendapatkan predikat desa dengan sistem administrasi terbaik se-kecamatan Lumar.

PLKB Tiga Berkat, Sutero mengatakan bahwa secara umum tidak ada tantangan berarti yang dia hadapi dalam melakukan semua tugasnya, termasuk dalam melakukan upaya advokasi dan sosialisasi Kampung KB kepada pihak terkait.

Tantangan yang sering dihadapi ialah kondisi geografis seperti kondisi jalan bebatuan dan jarak tempuh yang jauh. “Secara umum tantangannya hanya itu, apalagi beberapa pihak terkait juga sudah tau apa itu Kampung KB,” ujarnya.

Menurut Sutero, dia berharap ke depannya Kampung KB di Bengkayang bisa semakin maju dan bisa memberikan hasil terbaik. “Sebagai PLKB saya juga berharap bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, sehingga ke depannya PLKB bisa menjadi pusat informasi terdepan untuk program KKBPK,” tambahnya.

Di sisi lain Kepala Desa sekaligus ketua TKBD Lesabela, Baharudin menerangkan, dalam melakukan sosialisasi pihaknya selalu melibatkan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat desa. Tujuannya tentu agar didengar oleh warga. “Syukurnya advokasi kami kepada para tokoh ini berhasil, sehingga mereka berkomitmen untuk mendukung Kampung KB, termasuk membantu dalam melakukan sosialisasi dengan warga,” pungkasnya.

Keberhasilan Bengkayang ternyata tidak lepas juga dari peran Tim Penggerak PKK yang memiliki komitmen tinggi untuk mendukung Kampung KB.

Melalui SE Tim Penggerak PKK No. E/01/PKK. KAB/X/2017 dituliskan, semua tim penggerak PKK yang ada di tingkat desa, Rukun Tetangga (RT), hingga kelompok dasawisma harus mendukung Kampung KB.

Mulai dari membantu pendataan KB, melakukan motivasi dan sosialisasi KB, mendukung kegiatan pelayanan KB dan monitoring evaluasi.

Kabupaten Kapuas Hulu

Jangkau yang Terpencil

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten terluas kedua, setelah Kabupaten Ketapang di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Putussibau. Data BPS 2017, menuliskan jumlah penduduk Kapuas Hulu sebanyak 250,400 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan, 278 desa, dan 4 kelurahan.

Kapuas Hulu dikenal sebagai kabupaten multi etnis. Daerah Putussibau Utara dan Selatan didominasi oleh etnis Tionghoa, Jawa dan Minang yang biasanya menguasai perdagangan. Sementara, etnis Melayu dan Dayak lebih banyak mendiami daerah pinggir sungai dan pendalaman.

Program Kampung KB di Kabupaten Kapuas Hulu dimulai sejak awal tahun 2016 dengan memilih satu desa yaitu Riam Tapang di kecamatan Silat Hulu. Sesuai dengan Juknis Kampung KB, Desa Riam Tapang dipilih karena letak geografisnya yang sangat sulit dijangkau.

Riam Tapang bukan hanya dikenal sebagai daerah terpencil, tertinggal, dan miskin saja. Melainkan juga sebagai desa yang minim akses infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, serta masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sebagian besar masyarakat di sana hanya lulusan sekolah dasar.

Angka kesehatan masyarakat juga sangat rendah, termasuk pengguna alat kontrasepsi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya tempat dan tenaga pelayan kesehatan di desa tersebut. Belum lagi masyarakat di sana juga belum merasakan akses listrik dan air bersih.

Riam tapang sekarang memang sangat jauh berbeda dari Riam Tapang yang dulu. Sejak masuknya program Kampung KB pada dua tahun belakang banyak perubahan menakjubkan yang terjadi di sana.

Bicara mengenai infrastruktur, kini Riam Tapang sudah memiliki jalan yang bisa dilalui kendaraan untuk masuk ke kampungnya, sehingga warga tidak perlu sulit lagi menyusuri sungai deras untuk menuju ibu kota kecamatan dan kabupaten. Sekolah dan pusat layanan kesehatan juga sudah dibangun, termasuk tenaga kesehatan pun sudah direkrut. Lebih dari itu, warga kini telah mendapatkan akses listrik dan air bersih.

Kondisi rumah-rumah tak layak huni juga mulai diperbaiki. Suasana Desa Riam Tapang berubah lebih asri dan bersih, karena setiap warga di sana tengah gencar memanfaatkan pekarangan rumah sebagai tempat menanam sayur mayur dan tumbuhan lainnya. Warga juga diajarkan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kolaborasi pemerintah daerah, DWG, lintas sektor, termasuk peran dari Dinas KB berhasil membawa angin segar bagi Riam Tapang. Antonius L. Ain Pamero, Wakil Bupati, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa ada beberapa kunci keberhasilan pelaksanaan Kampung KB di daerahnya, pertama adanya komitmen tinggi dari kepala daerah.

Dalam hal dukungan yang diberikan ialah Bupati mengeluarkan surat imbauan kepada seluruh pihak, termasuk SKPD dan mitra pemerintah untuk membantu Kampung KB dengan mengalokasikan dana dan program kerja di lokasi Kampung KB.

Kunci sukses kedua ialah pemilihan lokasi Kampung KB yang tepat. Menurut Antonius, Riam Tapang sengaja dipilih karena merupakan desa terujung. Artinya, bila infrastruktur menuju Riam Tapang dibangun, maka yang merasakan dampak bukan hanya Riam Tapang saja, melainkan desa lain disekitarnya.

Contohnya, saat akses jalan menuju Riam Tapang dibuka dan dibangun, maka akses jalan pada beberapa desa juga ikut dibangun.

Ketiga, adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Untuk poin ini keberadaan DWG Kapuas Hulu yang beranggotakan lintas sektor sangatlah membantu.

Untuk penguatan tim advokasi DWG, Bupati juga sudah mengesahkan pembentukan DWG melalui SK No. 350 Tahun 2015.

Selanjutnya ialah adanya pelaporan rutin Kampung KB setiap tiga bulan. Bukan hanya dapat memudahkan penyusunan kegiatan Kampung KB ke depan, namun laporan ini juga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan capaian Kampung KB.

Untuk mengembangkan performa Kampung KB, pada 2018 pemerintah Kapuas Hulu akan fokus pada pembinaan dan optimalisasi capaian kerja Kampung KB yang sudah terbentuk. Hingga akhir 2017, setiap kecamatan sudah memiliki satu Kampung KB, dengan total 23 desa Kampung KB.

KAMPU
& MASA

UNG KB

DEPAN

Sejak era desentralisasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia cenderung stagnan. Hal ini dibuktikan melalui hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 yang menunjukkan angka total kelahiran (*Total Fertility Rate*/ TFR) Indonesia masih cukup tinggi yaitu sebesar 2,4.

Angka ini menunjukkan bahwa wanita Indonesia rata-rata melahirkan 2,4 anak selama hidupnya. Di samping itu, SDKI 2017 juga menunjukkan angka *unmeet need* tinggi yakni berada di posisi 10,6.

Berangkat dari itu berbagai pihak saat ini mulai banyak berupaya untuk kembali mengguatkan performa program KKBPK di Indonesia.

Upaya ini bukan hanya dari pihak pemerintah saja, melainkan juga dari pihak-pihak lain seperti pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi dan juga keagamaan, termasuk masyarakat. Selain itu, dari sisi DWG yang merupakan kelompok kerja lintas sektor berbagai inovasi juga sudah dilakukan agar program KKBPK kembali berjaya.

Ada langkah-langkah yang bisa dilakukan agar Kampung KB berjalan dengan baik di lapangan, di antaranya dengan menyusun perencanaan atau rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan desa. Untuk mendukung hal itu dibutuhkan pula peningkatan kapasitas bagi pengelola Kampung KB.

Langkah selanjutnya ialah meyakinkan pengambil kebijakan, khususnya bupati/walikota, wakil bupati/ wakil walikota, serta sekretaris daerah. Kemudian membangun kerjasama kepada semua pihak mulai dari level penentu kebijakan hingga pelaksana. Kunci sukses lainnya yaitu menjalin kolaborasi dengan lintas sektor agar bisa melakukan integrasi dan kolaborasi program dengan Kampung KB.

Keberadaan PWG, DWG, Tim KB Kecamatan dan dan Tim KB Desa/Kelurahan juga membuat semua upaya yang dilakukan menjadi lebih mudah dan terarah. Selain itu, diperlukan juga fasilitator yang bisa mendampingi pelaksanaan program Kampung KB.

Sebagai program terobosan, Kampung KB tidak saja diharapkan untuk menguatkan kembali Program KKBPK, tetapi juga guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga ke depannya masyarakat bisa memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Melalui Kampung KB, diharapkan akan muncul keluarga-keluarga yang berkualitas yang menghasilkan generasi-generasi cemerlang yang berguna bagi masa depan bangsa. Pengalaman berbagai pihak yang telah berhasil menjalankan Kampung KB ini diharapkan bisa menjadi referensi dan memberikan inspirasi.

Diharapkan juga semua hal yang tertulis dalam buku ini bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk kita semua. Tujuannya tidak lain untuk menguatkan kembali program KKBPK yang telah terbukti memiliki banyak manfaat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan buku ini tidak dapat berjalan lancar tanpa kontribusi para narasumber dan kontributor yang telah memberikan informasi dan konsultasi terkait program Kampung KB, baik dalam skala nasional maupun kabupaten/kota. Untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, kontributor dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

- Sonny Harry Harmadi, Staf Ahli Bidang Kependudukan , Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
- Antonius L. Ain Pamero, Wakil Bupati, Kabupaten Kapuas Hulu
- Wahidin, Direktur Bina Lini Lapangan, BKKBN.
- Muhammad Ikhsan, Asisten Sekretaris Daerah, Kabupaten Sumbawa
- Kusmana, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat
- Martha Banang, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB), Kabupaten Kapuas Hulu
- Erni Suryana, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (P4), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Lombok Barat
- Elvy Wahyuni, Kepala Bidang KB, DP2KBP3A
- Farida Alfawati, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DPPKBPP) Kabupaten Lumajang
- Udiarsa, Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB)
- Denny Rianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kabupaten Kuningan
- Usep Yusep, Kepala Bidang Advokasi dan Penggerakan, DPPKB Kuningan,
- Antonius Tony, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kabupaten Bengkayang
- Murniati, Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya, Kabupaten Kapuas Hulu
- Ledung, Sekretaris Dinas PU, Binamarga, dan Sumber Daya Alam, Kabupaten Kapuas Hulu
- Umi Yuniati, DP3AKB Provinsi Jawa Timur
- Dewi, Staff Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kabupaten Kediri
- Kartini, Staff Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
- Aida Mochtar, Ketua PWG Kalimantan Barat
- Ninin Nurmalasari, staf Dinas Koperasi, Kabupaten Kuningan
- Ary Budianto, Camat Kepung, Kabupaten Kediri
- Hizbullah, Camat Labuan Badas
- Iwan Sofian, Camat Lantung, Kabupaten Sumbawa
- Sumari, Kepala Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri
- Ardi Wijaya, Kepala Desa Bendungan, Kabupaten Kuningan
- Rakib, Kepala Desa Dukuh Lor, Kabupaten Kuningan
- Baharudin, Kepala Desa Lesabela, Kabupaten Bengkayang
- Simon Petrus Melaban, Kepala Desa Riam Tapang
- Valentinus Jali, Kepala Desa Laja Sandang, Kabupaten Kapuas Hulu
- Tabrani, Staff Camat Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu
- Farida, Ketua Tim KB Desa, Tiga Berkat, Kabupaten Bengkayang
- Reni, PLKB Ploserejo, Kabupaten Kediri
- Odah Saodah, Desa Bendungan, Kabupaten Kuningan
- Rika Oktariani, PLKB Karang Dima, Kabupaten Sumbawa
- Sutero, PLKB Tiga Berkat, Kabupaten Bengkayang
- Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.